

**AMNESTY INTERNATIONAL
PUBLIC STATEMENT**

**Index: ASA 21/009/2013
18 April 2013**

Kata sambutan dalam konferensi pers di Jakarta pada peluncuran laporan "Saatnya menghadapi masa lalu" tentang konflik Aceh

Pada 18 April 2013, Amnesty International meluncurkan laporan berjudul "Saatnya menghadapi masa lalu (Time to face the past)" tentang konflik Aceh di Indonesia. Ini merupakan kata sambutan yang disampaikan oleh Isabelle Arradorn, Deputi Direktur Asia Pasifik Amnesty International, saat jumpa pers peluncuran laporan di Jakarta.

Terima kasih kepada semua hadirin yang datang hari ini, Saya ingin memulai dengan mengucapkan terima kasih kepada mereka yang duduk bersama saya di sini – Murtala, seorang penyintas dari kasus Tragedi Simpang KKA, kasus di mana pasukan militer Indonesia membunuh puluhan warga sipil di Aceh Utara pada 1999 dengan impunitas total. Juga duduk bersama saya di sini adalah Gilang, koordinator KontraS Aceh. Gilang, bersama dengan rekan-rekan dari organisasi hak asasi manusia, Koalisi NGO HAM, bekerja tanpa kenal lelah dengan para keluarga orang hilang di Aceh. Perkenankan saya juga untuk mengucapkan terima kasih kepada Haris Azhar, koordinator KontraS di Jakarta, yang organisasinya terus mengingatkan kita bagaimana hanya sedikit upaya yang diambil Indonesia sejauh ini untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran HAM di masa lalu, dan sedikit upaya untuk mereformasi sektor keamanan dan mempromosikan supremasi hukum sejak dimulainya transisi demokrasi pada 1998.

Sebagaimana yang Anda ketahui, hari ini kita di sini meluncurkan laporan Amnesty International yang baru, yang kami beri judul "Saatnya menghadapi masa lalu – Keadilan bagi korban pelanggaran masa lalu di Provinsi Aceh, Indonesia". Laporan ini berdasarkan riset terbaru Amnesty International yang dilakukan pada Mei 2012. Laporan ini membahas isu yang sangat relevan tidak hanya di Aceh, tetapi juga untuk Indonesia secara keseluruhan – yaitu, menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia masa lalu, dan memastikan bahwa hak-hak para korban dipenuhi. Hingga hari ini, apa yang sudah dilakukan tidaklah cukup untuk memastikan perbaikan HAM yang sejati dan berkelanjutan, dan supremasi hukum di Indonesia.

Konflik Aceh antara gerakan kemerdekaan GAM dan pemerintah Indonesia berlangsung sejak pertengahan 1970-an, tetapi mencapai titik kekerasan tertinggi antara 1989 dan 2005. Konflik ini menghasilkan kerusakan luar biasa terhadap penduduk di Aceh – antara 10.000 dan 30.000 tewas terbunuh di Aceh, banyak di antaranya adalah penduduk sipil.

Baik militer Indonesia dan GAM melakukan pelanggaran HAM yang serius selama konflik Aceh. Namun demikian, menurut investigasi-investigasi resmi sebagian besar pelanggaran HAM tersebut dilakukan oleh anggota-anggota pasukan keamanan dan para pendukungnya. Pelanggaran-pelanggaran HAM tersebut mencakup pembunuhan di luar proses hukum, penghilangan paksa, penyiksaan, pengusiran paksa penduduk sipil, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang bagi mereka yang dituduh mendukung GAM. Pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan GAM termasuk penyanderaan, dan pembunuhan dengan target mereka yang dituduh sebagai informan, pejabat pemerintah, dan pegawai negeri sipil.

Meskipun jarang diberi label semacam ini, banyak dari pelanggaran-pelanggaran HAM tersebut merupakan kejahatan di bawah hukum internasional. Pelanggaran-pelanggaran HAM tersebut adalah penyiksaan, pembunuhan ekstra yudisial, penghilangan paksa, kemungkinan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pelanggaran-pelanggaran HAM ini melawan komunitas internasional sebagai keseluruhan, dan adalah kewajiban dari semua Negara untuk menyediakan pemulihan yang efektif kepada para korban dari pelanggaran-pelanggaran semacam ini.

Saya sendiri dulu tinggal di Aceh pada sebagian dari masa konflik, dan menyaksikan dampak luar biasa yang ditinggalkan oleh kekerasan bertahun-tahun terhadap kehidupan orang-orang di sana.

Ketika perjanjian damai ditandatangani pada 2005, pejabat parlemen dan militer menekankan kebutuhan untuk melupakan masa lalu supaya bisa melangkah ke depan dan tidak mengganggu proses perdamaian.

Namun hari ini, hampir delapan tahun setelah konflik berakhir, situasi keamanan di Aceh relatif stabil. Inilah saatnya mewujudkan komitmen terdahulu dan memastikan kebenaran, keadilan, dan reparasi (pemulihan) bagi para korban dan keluarga mereka. Juga penting bagi komunitas internasional secara keseluruhan, dan secara khusus Negara-negara anggota Uni Eropa dan ASEAN yang memantau perjanjian damai, untuk tidak melupakan Aceh dan mendukung proses ini.

Banyak dari korban dan perwakilan mereka yang berbicara dengan kami pada 2012, dan juga minggu ini, menyatakan hal yang sama – menyambut perbaikan situasi keamanan di Aceh, tetapi mereka tidak bisa mengerti mengapa hak-hak mereka atas kebenaran, keadilan, dan reparasi (pemulihan) masih diabaikan.

Secara keseluruhan, pemerintah Indonesia telah gagal menyelesaikan kejahatan-kejahatan yang terjadi selama konflik, dan komunitas internasional tetap bungkam. Perjanjian damai 2005 untuk berbagai langkah tertentu telah menyediakan jalan untuk kebenaran dan keadilan, namun belum juga diselesaikan. Perjanjian damai secara khusus menyatakan bahwa baik Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi maupun Pengadilan HAM untuk Aceh harus dibentuk. Namun hari ini, tidak satu pun badan-badan ini dibentuk.

Lebih lanjut, dengan pengecualian yang sedikit, tidak ada satu pun mereka yang bersalah atas pelanggaran-pelanggaran di masa konflik telah dibawa ke muka pengadilan. Persidangan-persidangan yang sedikit terhadap anggota-anggota pasukan keamanan di bawah pengadilan militer atau pengadilan koneksitas militer-sipil, minim transparansi dan secara keseluruhan tidak memadai. Juga persidangan-persidangan terhadap mereka yang dituduh anggota GAM tidak memenuhi standar internasional tentang peradilan yang adil. Sejak 2005 tidak ada satu pun kasus pelanggaran HAM selama konflik Aceh yang dibawa ke persidangan.

Ratusan keluarga korban dan individu, seperti Murtala yang bersama dengan kita hari ini, masih mengalami kegelapan atas apa yang terjadi terhadap mereka yang disayangnya “hilang”, yang mana menambah penderitaan mereka. Hingga sekarang tidak ada satu pun investigasi resmi yang dilakukan untuk pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi selama konflik Aceh, termasuk yang dilakukan oleh Komnas HAM, tersedia secara untuk publik.

Dalam suatu langkah yang positif, pihak-pihak berwenang Indonesia telah membuat beberapa upaya untuk membantu para korban secara finansial setelah konflik. Namun demikian, banyak korban menuntut lebih. Mereka menyerukan program reparasi (pemulihan) yang tepat terkait pelanggaran-pelanggaran HAM masa lalu, dan suatu pengakuan dari pemerintah bahwa mereka telah menderita, seperti contohnya lewat suatu permintaan maaf secara resmi dan publik. Cukup mengejutkan bahwa para penyintas perempuan dari kekerasan seksual dilupakan dan terus kesulitan terhadap akses perawatan dan bantuan yang tepat.

Minimnya kebenaran, keadilan, dan program reparasi (pemulihan) yang memadai juga telah memberikan dampak terhadap hukum dan ketertiban di Aceh, dan juga terhadap Indonesia sebagai keseluruhan. Dengan para pelaku pelanggaran-pelanggaran HAM dari institusi keamanan masih bergerak bebas, tidak ada pencegahan untuk mereka ditempatkan pada posisi di mana pelanggaran-pelanggaran masa lalu tersebut dapat diulangi. Kasus baru-baru ini tentang pembunuhan di luar proses hukum yang dilakukan anggota-anggota Kopassus di Jawa menjadi pengingat yang mencolok bahwa kegagalan secara menyeluruh untuk reformasi institusional dan melawan impunitas dapat membawa pelanggaran HAM yang baru.

Para korban di Aceh khawatir bahwa konflik bisa terjadi lagi karena ketegangan antar komunitas-komunitas. Aceh merupakan salah satu provinsi termiskin Indonesia, dan provinsi ini memiliki sejumlah besar anak-anak muda yang tumbuh di dalam kesempatan ekonomi yang terbatas. Meski situasi keamanan stabil di Aceh hari ini, tidak berarti bawah situasi ini

akan terus demikian. Jika perdamaian tidak didampingi oleh keadilan, akan ada resiko nyata meningkatnya ketegangan dan kebencian yang bisa berujung pada kembalinya kekerasan.

Dengan kebenaran, keadilan, dan reparasi (pemulihan), proses perdamaian tidak hanya disokong, namun juga bisa diperkuat. Kami di sini hari ini menyerukan kepada pihak-pihak berwenang Indonesia, untuk mewujudkan komitmennya pada 2005 dan memenuhi kewajiban hak asasi manusia mereka. dan Ada langkah-langkah konkrit yang bisa membuat terjadinya perbedaan nyata bagi kehidupan para korban dan keluarga mereka di Aceh. Amnesty International merekomendasikan pihak-pihak berwenang Indonesia dengan dukungan komunitas internasional untuk:

- Mengakui bahwa pelanggaran-pelanggaran HAM serius, termasuk kemungkinan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang terjadi selama konflik Aceh.
- Membentuk suatu komisi kebenaran yang sesuai dengan standar-standar internasional tanpa penundaan baik untuk Aceh maupun untuk Indonesia secara keseluruhan.
- Memastikan bahwa langkah-langkah segera akan diambil untuk mengetahui nasib dan keberadaan para korban penghilangan paksa.
- Menyelidiki dan menyidangkan semua yang bertanggung jawab terhadap kejahatan di bawah hukum internasional.
- Membentuk suatu program yang menyediakan reparasi (pemulihan) yang efektif dan penuh bagi seluruh korban pelanggaran HAM di Aceh.

Dalam beberapa hari terakhir, kami telah bertemu pihak-pihak berwenang baik di Banda Aceh dan Jakarta yang mengakui bahwa langkah-langkah konkrit untuk memastikan kebenaran, keadilan, dan reparasi (pemulihan) penuh di Aceh masih mandeg. Sekarang tinggal dilihat apakah ada kehendak politik yang cukup baik secara local, nasional, maupun internasional untuk mengambil langkah-langkah nyata untuk menyelesaikan masalah ini.